



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5009-5017

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hubungan Politik Indonesia-Australia pada masa Megawati Soekarnoputri

Eko Wahyu Junaidi<sup>1✉</sup>

Universitas Tanjungpura

Email: [eko.wahyu.junaidi@fkip.untan.ac.id](mailto:eko.wahyu.junaidi@fkip.untan.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstract

The relationship between Indonesia and Australia has experienced various interesting dynamics. One of the lowest points in the relationship between Indonesia and Australia was when one of the provinces in Indonesia, East Timor, broke away from Indonesia. The Indonesian public considers that independence from East Timor is very closely related to Australia's involvement in the process. This has resulted in strained relations between the two countries. Relations between the two countries stretched during the leadership of President B.J. Habibie and continued until the time of President Abdurrahman Wahid. Relations between Indonesia and Australia improved significantly during the leadership of President Megawati Soekarnoputri. Cooperation between the two countries that had stopped running. John Howard is the first world leader to congratulate Megawati Soekarnoputri on her inauguration as president of Indonesia.

Keywords: *Australia, Indonesia, Megawati, Relationship*

## Abstrak

Hubungan Indonesia dan Australia mengalami berbagai dinamika yang menarik. Salah satu titik terendah hubungan Indonesia dan Australia ialah ketika salah satu provinsi di Indonesia yaitu Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Publik Indonesia menilai bahwa kemerdekaan dari Timor Timur sangat erat kaitannya dengan keterlibatan Australia didalam prosesnya. Hal ini berakibat pada hubungan kedua negara yang merenggang. Hubungan kedua negara merenggang pada masa kepemimpinan presiden B.J. Habibie dan berlanjut hingga masa presiden Abdurrahman Wahid. Hubungan Indonesia dan Australia membaik secara signifikan pada masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri. Kerjasama diantara kedua negara yang sempat berhenti kembali berjalan. John Howard ialah pemimpin dunia yang pertama kali memberikan selamat atas pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Indonesia.

Kata Kunci: *Australia, Hubungan, Indonesia, Megawati.*

## PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan baik. Publik Australia memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi menjadi ancaman nasional Australia. Pada tahun 1993 diadakan sebuah konsensus di Australia, dimana sebanyak 57% responden menilai Indonesia akan menjadi ancaman dalam 15 tahun kedepan. Sebanyak 28% responden dari legislator Australia juga percaya bahwa Indonesia akan menjadi ancaman nasional. Konsensus ini menempatkan ancaman yang berasal dari Indonesia lebih tinggi di banding dengan kemungkinan ancaman dari Russia (Philpott, Simon, 2001:379). Pada beberapa tahun sebelum 1993, ancaman dari Russia masih berada di atas kemungkinan ancaman yang akan muncul dari Indonesia. Indonesia termasuk kedalam negara yang paling diwaspadai oleh publik Australia sebagai musuh. Ada 5 negara yang paling diwaspadai publik Australia, yaitu: Indonesia, Rusia, China, Jepang, dan Vietnam (Alison & Toni, 2007: 64).

Publik Australia mengenal Indonesia sebagai negara yang dipimpin oleh seorang diktator, sangat sentralistik serta militer yang berperan sebagai penjaga berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dwifungsi ABRI (Heiduk, Felix, 2014: 300). Publik Australia mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menilai hubungan kedua negara. Publik Australia melihat banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Masalah Timor Timur, Papua, dan Aceh yang berlarut-larut menjadi penilaian buruk publik Australia terhadap Indonesia. Mereka menilai bahwa Indonesia buruk dalam

hal menangani hak asasi manusia, terutama mengenai Timor Timur (Brown, Colin, 1999: 103).

Pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia, hubungan politik dengan Australia hampir sama sekali dihancurkan. Kerjasama militer kedua negara yang rutin dilakukan sejak awal periode 1990-an, juga berhenti begitu saja. Hubungan militer yang bersahabat dari kedua negara, dengan cepat berubah menjadi saling memusuhi. Kerjasama militer Indonesia dan Australia, yang di singkat AMS (*Agreement to Maintain Security*), yang ditandatangani pada tahun 1995 dibatalkan secara tiba-tiba pada tahun 1999. Kerjasama ini adalah kerjasama militer kedua negara (Siti & Dafri, 2015). Berbagai latihan militer kedua negara yang telah direncanakan, kemudian dibatalkan. Pembelian senjata Indonesia dari Australia juga dibatalkan, hal ini juga merupakan dampak ketegangan hubungan politik kedua negara (Siti & Dafri, 2015).

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hubungan Indonesia-Australia mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada 13 Agustus 2001, Perdana Menteri Australia, John Howard, berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Megawati. Kunjungan John Howard, menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, sangat penting dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara (Kompas, 13 Agustus 2001). Setelah beberapa tahun mengalami hubungan yang cukup panas, momen ini memberikan pesan bahwa ada kemauan dari kedua pemimpin negara untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dengan saling percaya dan saling pengertian. Hubungan politik kedua negara banyak terbantu dengan isu pertahanan dan keamanan yang memaksa kedua negara mengenyampingkan ego masing-masing. Australia juga banyak memunculkan kerjasama yang melibatkan masyarakat kedua negara guna meningkatkan rasa saling pengertian diantara kedua negara. Terlibatnya masyarakat kedua negara, akan lebih memunculkan rasa saling menghargai berbagai perbedaan yang terdapat dikedua negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2013), metode penelitian sejarah terdiri dari pemilihan topik, *heuristik*, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pada penelitian ini, peneliti memilih topik hubungan politik Indonesia dan Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada tahap pengumpulan sumber (*heuristik*), peneliti menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku, artikel, dan dokumen arsip. Pada tahap interpretasi, peneliti melakukan kritik sumber yang sebelumnya telah didapatkan pada tahap *heuristik*. Setelah tahap interpretasi, dilakukan tahap verifikasi

hingga historiografi. Pada tahap ini peneliti mulai menulis dinamika hubungan politik Indonesia dan Australia pada masa Megawati Soekarnoputri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Agustus 2001, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden Indonesia, menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan oleh MPR-RI. Megawati Soekarnoputri segera menyusun kabinet kerja pemerintahannya. Kebijakan pemerintah di bawah Megawati Soekarnoputri yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara lain antara lain ialah menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif secara konsekuen dan menjalin kerjasama internasional yang lebih luas bagi perdamaian dan stabilitas internasional (Anonim, 2004: 250). Tidak berselang lama setelah pelantikannya sebagai Presiden Indonesia yang baru, Megawati Soekarnoputri mengundang Perdana Menteri Australia, John Howard, untuk berkunjung ke Jakarta secara langsung melalui sambungan telepon. John Howard menanggapi undangan Megawati ini dengan datang ke Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2001 (Kompas, 13 Agustus 2001: 7).

Pemimpin dunia pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan semenjak Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ialah John Howard. Kunjungan Perdana Menteri Australia ini berdasarkan undangan secara lisan dari Presiden Megawati Soekarnoputri sebelumnya (Kompas, 13 Agustus 2001: 7). Perdana Menteri Australia ini berkunjung ke Indonesia tanggal 12 Agustus 2001 bertemu langsung dengan Presiden Megawati Soekarnoputri pada sore hari, selama 30 menit (Kompas, 11 Agustus 2001: 2). Kunjungan John Howard ke Jakarta secara langsung membatalkan kehadirannya pada pertemuan tahunan Pasifik Selatan di Selandia Baru (Kompas, 10 Agustus 2001: 3). Banyak kalangan dari menilai, baik itu dari publik Australia dan Indonesia, kedatangan John Howard berhubungan dengan pemilu di Australia guna menaikkan elektabilitasnya pada pemilu pada akhir 2001 (Singh, 2002:135). Tidak dapat dipungkiri, John Howard adalah pemimpin dunia pertama yang berkunjung ke Indonesia setelah penobatan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia yang baru.

Kunjungan John Howard ke Indonesia bertujuan memberikan Megawati Soekarnoputri legitimasi dan pengenalan kepada dunia internasional. Tujuan yang kedua ialah memberikan indikasi bahwa kebijakannya di Timor Timur tidak menghancurkan hubungan kedua negara seperti yang banyak dilihat banyak pihak ketika itu (Singh, 2002:136). Ia percaya bahwa hubungan kedua negara semakin membaik kedepannya dan melupakan kejadian di masa lalu, terutama soal Timor Timur. Bagi John Howard, Australia sebagai

negara dengan masyarakat yang lebih maju memiliki kewajiban untuk membantu Indonesia. John Howard beranggapan bahwa perkembangan yang terjadi di Indonesia akan selalu berpengaruh terhadap kepentingan Australia. Hal ini akan membawa pengaruh stabilitas kawasan.

Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengundang John Howard secara langsung untuk datang ke Jakarta, menyatakan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia penting untuk kedua negara. Menurut Megawati, banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Megawati Soekarnoputri berharap, kerjasama yang dibangun Indonesia dan Australia akan menjadi lebih baik serta cara pandang yang lebih realistis tentang hubungan kedua negara (Kompas, 13 Agustus 2001: 7). Megawati berharap dengan kunjungan John Howard ke Jakarta akan dicapai berbagai kesepakatan yang substantif dalam rangka meningkatkan kerjasama kedua negara.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda, menilai kunjungan John Howard sangat penting guna memperkuat hubungan kedua negara. Hassan Wirayuda memberikan pernyataan kepada wartawan koran Kompas bahwa kunjungan ke Jakarta merupakan kontak yang sangat intensif, terutama perkenalan yang bagus bagi kedua pemimpin. Kunjungan John Howard ke Jakarta juga menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri kedua negara, sebab faktanya Indonesia dan Australia adalah tetangga yang tak bisa dipisahkan (Kompas, 13 Agustus 2001: 7). Menurut Hassan Wirayuda, Australia juga memiliki keinginan untuk memperkecil berbagai perbedaan yang selama ini terjadi dengan Indonesia, terutama menyangkut masalah Timor Timur.

Pemerintah Indonesia dan Australia mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini dilakukan untuk tujuan yang lebih besar daripada terus terpaku pada masalah lama yang memang sering menjadi sumber perbedabatan kedua negara. John Howard kembali menegaskan keinginan Pemerintah Australia untuk membangun hubungan bilateral dengan Indonesia yang lebih baik pada konferensi persnya di Hotel Regent Jakarta pada 13 Agustus 2001. John Howard berujar bahwa perbedaan yang terjadi dimasa lalu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia dan Australia untuk menyamakan persepsi diantara Indonesia dan Australia demi masa depan bersama yang lebih baik (Kompas, 14 Agustus 2001: 1).

Kunjungan John Howard ke Indonesia menghasilkan sebuah komunike bersama Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2001 (Kompas, 14 Agustus 2001: 1). Komunike bersama itu memuat 15 poin kesepakatan antara Indonesia dan Australia. Komunike bersama itu memuat mengenai penegasan kembali posisi Australia

yang mendukung sepenuhnya integritas dan kesatuan teritorial Indonesia. Indonesia dan Australia bersepakat mengenai masalah di Aceh dan Papua, dimana lebih harus mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) serta mengutamakan dialog bersama. Australia juga mendukung mengenai penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Pada kunjungannya kali ini, John Howard juga menegaskan komitmen Australia untuk membantu Indonesia dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca mengalami krisis moneter pada tahun 1997.

Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang menjadi sasaran utama John Howard dalam kebijakan strategisnya di Asia Pasifik seperti yang tercantum dalam Buku Putih Luar Negeri dan Perdagangan 2003. Australia selama era Perdana Menteri John Howard menghadapi tiga peristiwa penting dalam hubungan luar negeri yaitu pertama, krisis ekonomi di Asia Tenggara/Timur 1997; kedua, peristiwa kerusuhan Timor Timur tahun 1999 pasca referendum; dan ketiga, serangan teroris di AS (2001) dan Bali (2002). Ketiga peristiwa ini menunjukkan kepemimpinan John Howard cukup tanggap dalam mengatasi krisis di luar negeri yang berimplikasi pada kepentingan Australia.

Buku Putih Luar Negeri 1997 secara garis besar menjelaskan kepentingan nasional Australia di Asia Pasifik. Kepentingan nasional Australia bukan hanya melindungi integritas teritorial Australia, tetapi memperhatikan stabilitas politik dan keamanan negara tetangga khususnya Indonesia. Kebijakan Australia terhadap Indonesia bisa dilihat dari tiga aspek yaitu bidang politik, keamanan serta ekonomi. Dalam bidang politik, Australia berkepentingan pada stabilitas politik Indonesia yang menopang integritas dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai tujuan nasional Indonesia. Australia melihat proses demokratisasi di Indonesia merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan nasional Indonesia tersebut (Department of Foreign Affairs and Trade, 2003: 14). Bagi Australia, ancaman terorisme dan radikalisme merupakan tantangan utama bagi transisi politik Indonesia pasca rezim otoriter orde baru (Department of Foreign Affairs and Trade, 2003: 81). Sehingga Australia menilai respon Indonesia terhadap ancaman dan tantangan ini penting bagi kawasan Asia Tenggara. Pada bidang ekonomi, semakin berkembangnya perekonomian Indonesia akan semakin meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara.

Pernyataan Profesor Jamie Mackie, salah satu ahli Indonesia dari Australia, mengatakan bahwa kepentingan Australia untuk tidak terlibat konflik langsung dengan Indonesia menjadi salah satu prioritas utama politik luar negerinya (Mackie, Jamie. 2007: 22). Kemudian Prof. Jamie Mackie secara lugas melihat kepentingan nasional Australia Indonesia harus sukses menjadi sebuah negara yang makmur, mengembangkan stabilitas

politik negara dan juga kebebasan masyarakat Indonesia dapat tercapai. Kembali tidak stabilnya politik, pemerintah yang otoriter, dominasi militer atau stagnansi ekonomi bisa membuat Australia cukup kesulitan (Mackie, Jamie. 2007: 23).

Meskipun hubungan Indonesia dan Australia masih belum stabil, tetapi kerjasama masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kerjasama yang dibangun pada masa Megawati Soekarnoputri memang berdasarkan asas saling percaya dan pola hubungan timbal balik serta konsisten. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda, kepada media dalam kunjungannya ke Canberra yaitu bahwa menjalin hubungan dengan Australia memiliki ketergantungan pada sudut pandang apabila melihat kepentingan nasional Indonesia. Indonesia dan Australia sama-sama memiliki kepentingan dalam menjalin hubungan kedua negara (Kompas, 2001).

Salah satu langkah Australia untuk membantu Indonesia di bidang politik dan keamanan ialah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerjasama kontraterorisme secara bilateral pada awal tahun 2002. Penandatanganan MoU ini kemudian menjadi peluang bagi terbukanya kerjasama di berbagai tingkatan diantara kedua negara. MoU ini sebetulnya terfokus pada kerjasama penegakan hukum terutama kejahatan terorisme lintas negara (Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2004: 88). Kerjasama yang dilakukan antara lain, bidang kepolisian, keimigrasian, dan pencucian uang oleh teroris (*terrorist financing*).

Pada Oktober 2002, Indonesia diteror oleh teroris dengan pengeboman di Bali. Menurut para pelaku, turis asing menjadi target utama dalam aksinya. Korban terbesar berasal dari negara Australia. Pemerintah Australia menyatakan bahwa peristiwa ini tentu mengancam keselamatan warganya yang berada di Bali. Australia juga mengkhawatirkan keberlangsungan aktivitas ekonomi sejumlah perusahaan Australia di Indonesia. Sehingga pemerintah Australia menganggap keterlibatannya dalam penyelidikan aksi terorisme Bom Bali I sangat penting (Gyngell, Wesley, 2007: 180). Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Australia memiliki kepentingan nasional untuk menyelamatkan warga dan ekonomi nasionalnya (Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2003: xix).

Hubungan politik antara Indonesia dan Australia terlihat sedikit adanya peningkatan ketika terjadinya peristiwa terorisme di Bali. Peristiwa terorisme di Bali pada Oktober 2002 membawa hikmah tersendiri bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Meskipun jumlah korban terbanyak berasal dari negaranya, namun Australia secara terbuka membantu Indonesia dalam memecahkan kasus pemboman di Bali dan menangkap para

pelaku yang masih buron ketika itu. Perdana Menteri Australia, John Howard, datang secara langsung guna memantau bagaimana penanganan korban di Indonesia.

## SIMPULAN

Secara umum, hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri meningkat. Hubungan bilateral kedua negara pada masa Megawati Soekarnoputri sedikit banyak terbantu dengan berbagai isu pertahanan dan keamanan. Peristiwa terorisme di Bali tahun 2002, semakin membuka Indonesia dengan ajakan Australia memperbaiki hubungan bilateral. Meskipun masih terdapat tentangan dari publik kedua negara, Indonesia dan Australia terus saling bahu membahu demi melindungi kepentingan masing-masing negara. Hal ini disadari betul oleh pejabat politik kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. *Megawati Membangun Negeri*. Jakarta: Komunitas Peduli Komunikasi.
- Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2004. *Transnasional Terrorism: The Threat to Australia*. Canberra: Commonwealth of Australia.
- Australian Department of Foreign Affairs and Trade. 2003. *Advancing the National Interest: Australian Foreign Affairs and Trade Policy White Paper*. Canberra: Commonwealth of Australia.
- Brown, Colin. 1999. *Australia and Indonesia: The Paradigm Shift*. Policy, Organisation and Society Journals: 103-121.
- Gyngell, Allan, & Wesley, Michael. 2007. *Making Australian Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heiduk, Felix. 2014. *State Disintegration and Power Politics in Post-Soeharto Indonesia*. Third World Quarterly, Taylor & Francis Journals, Vol. 35(2), pages 300-315, February.
- Kompas, "Diplomasi Gerak Cepat John Howard", 11 Agustus 2001.
- Kompas, "PM Howard Penuhi Undangan Megawati", 13 Agustus 2001.
- Kompas, "Australia-Indonesia Tak Akan Berkutat Pada Perdebatan di Masa Lalu", 14 Agustus 2001.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mackie, Jamie. 2007. *Australia-Indonesia: Current Problems and Future Prospect*. Sydney: Institut Lowy.
- Philipott, Simmon. 2001. *Fear of the Dark: Indonesia and the Australian National Imagination*. *Australian Journal of International Affairs*. 379.

- Singh, Bilveer. 2002. *Defense Relations Between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era*. London: Greenwood Press.
- Siti Muti'ah Setyawati & Dafri Agussalim. 2015. *Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 111-124.